

KABUPATEN SUMBAWA – PROFIL KERENTANAN BENCANA ALAM

Profil ini merupakan penjelasan singkat mengenai kerentanan lingkungan Alam, Buatan, Sosial dan Ekonomidi Kabupaten Sumbawa terhadap ancaman bencana alam. Inisiatif Pengurangan Risiko Bencana oleh pemerintah daerah juga dijelaskan dalam profil ini.

2016



Desa-desa yang terletak di dekat pantai berpotensi terkena tsunami dan banjir yang terjadi lebih sering akibat gelombang badai dan gelombang besar.

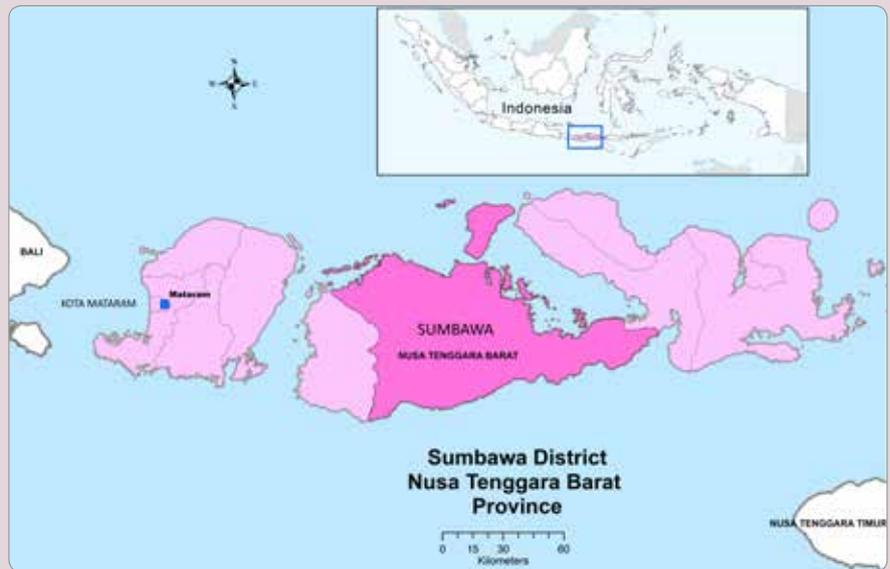


LINGKUNGAN ALAM

Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia (Gambar 1). Kabupaten Sumbawa terletak di sebagian wilayah dari Pulau Sumbawa dan sebagian lainnya ada di Pulau Moyo yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa mencakup area seluas 6,643.98 km². Ibukota Kabupaten Sumbawa adalah Sumbawa Besar.

Ancaman dan Risiko

Kabupaten Sumbawa memiliki beragam ancaman bencana alam. Ancaman tersebut meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan erosi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, tsunami, dan konflik sosial. Pada tahun 1977, gempa bumi dengan magnitudo 8.3 di Palung Sunda menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan kerusakan signifikan di Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya (Gusman dkk., 2009). Pada tahun 1815, salah satu letusan yang paling hebat yang terekam sejarah adalah di Gn. Tambora dan berdampak parah ke area tersebut. Kabupaten Sumbawa memiliki angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 150 (tinggi) dan menempati peringkat ke-302 dari total 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana (BNPB 2013).



Kerentanan Lingkungan Alam

Proses geologi aktif yang terjadi di Kabupaten Sumbawa sebagian besar berkaitan dengan tumbukan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Tumbukan kedua lempeng tersebut salah satunya menghasilkan Palung Sunda yang terletak di bagian selatan Pulau Sumbawa, dan dapat mengakibatkan gempa bumi besar serta mampu menghasilkan tsunami yang akan merusak di area Kabupaten Sumbawa terutama di bagian selatan. Selain itu, kehadiran sesar aktif lokal di bagian utara memperbesar risiko gempa bumi. Pulau ini juga terdapat risiko

bencana dari letusan gunung api, terutama terhadap debu vulkanik dari Gn. Rinjani dan Gn. Tambora.

Dataran aluvial yang terbentuk sebagai aliran dari lembah yang memiliki lereng yang terjal sangat rentan terhadap bencana banjir, khususnya saat musim hujan. Kawasan pantai yang rendah dimana terdapat banyak pedesaan akan sangat terpengaruh terhadap proses pantai seperti erosi pantai, gelombang badai, dan tsunami. Dampak proses pantai ini mungkin diperparah oleh adanya perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

Table 1. Penilaian risiko berdasarkan ancaman yang ada di Kabupaten Sumbawa (Indeks Risiko Bencana Indonesia – 2013).

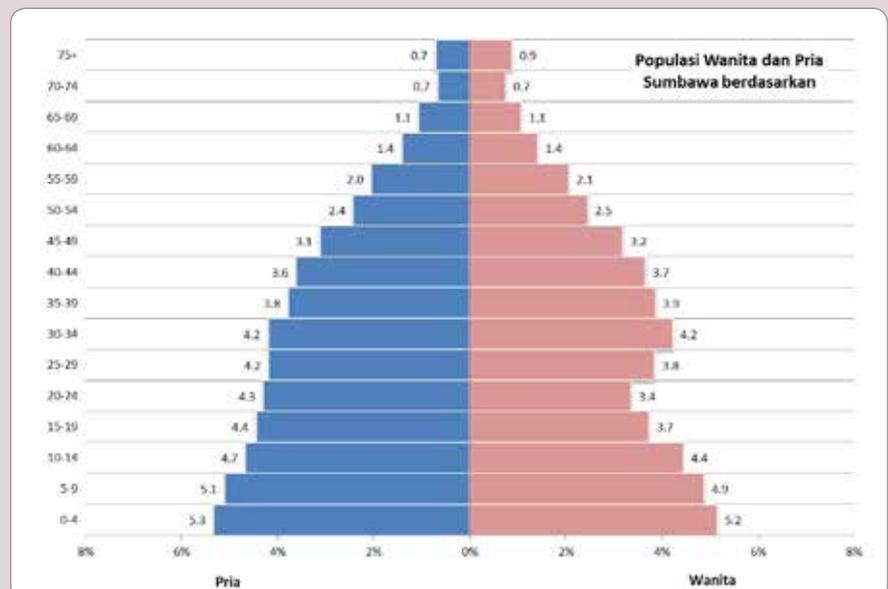
Threat	Gempa Bumi	Tsunami	Cuaca Ekstrim	Tanah Longsor	Abrasi Pantai	Kebakaran Hutan	Kekeringan
Risk	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

LINGKUNGAN SOSIAL

Populasi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 adalah 431,924 jiwa dengan kepadatan penduduk rerata adalah 66 orang per km². Kecamatan Sumbawa Besar adalah kecamatan yang paling padat penduduknya dengan 1,327 penduduk per km². Sebagian besar penduduk Kabupaten Sumbawa beragama Islam dan Hindu.

Populasi Penduduk Usia Muda

Lebih dari setengah penduduk Kabupaten Sumbawa (53,4%) merupakan penduduk muda dengan usia 30 tahun atau lebih muda. Penduduk usia muda dapat lebih rentan terhadap bencana, meskipun demikian pada usia ini mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan mengenai bahaya dan risiko melalui sekolah. Selain itu, media sosial adalah model pendidikan yang bagus untuk anak-anak dan pemuda.



Source: Sumbawa Regency in Figures 2015.

LINGKUNGAN EKONOMI

Pengelolaan Daerah Tangkapan

Penggundulan hutan menyebabkan lahan terbuka menjadilebihmudah terkena erosi. Curah hujan yang tinggi dapat dengan mudah mengalirkan sedimen ke hilir dan memperparah banjir dan kemudian merusak infrastruktur dan properti. Parahnya banjir di hilir akibat buruknya praktik pengelolaan daerah tangkapan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan.

LINGKUNGAN BUATAN

Longgarnya pengendalian dan perencanaan tataguna lahan

Di Kabupaten Sumbawa belum ada perencanaan tataguna lahan yang mengidentifikasi dan melarang ataupun mengurangi pembangunan infrastruktur/bangunan di area ancaman bencana alam. Dengan demikian, banyak bangunan yang memiliki risiko banjir dan lokasi baru lainnya yang akan dikembangkan tidak mempertimbangkan kondisi lahan dan ancaman alam. Data atau informasi yang tersedia di lokasi tertentu dan sekitarnya sangat minim.

Konstruksi bangunan yang belum berkualitas

Banyak bangunan di Kabupaten Sumbawa tidak mengikuti spesifikasi perancangan atau dibangun dengan menggunakan material kualitas rendah. Dengan demikian produk akhir struktur bangunan tidak kuat, yang artinya struktur-struktur tersebut kemungkinan akan tidak akan kuat atau rusak pada saat gempa bumi atau bencana alam lainnya.

KEMAMPUAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Anggaran untuk penanggulangan bencana untuk tahun 2016 adalah Rp6,6M (USD506k) dan secara rerata, terus meningkat sejak 2011. Walaupun di Kabupaten Sumbawa ada dukungan politik yang baik untuk penanggulangan bencana, kapasitasnya secara timpang ditekankan kepada kegiatan tanggap darurat dibandingkan kepada perencanaan yang efektif.

Koordinasi

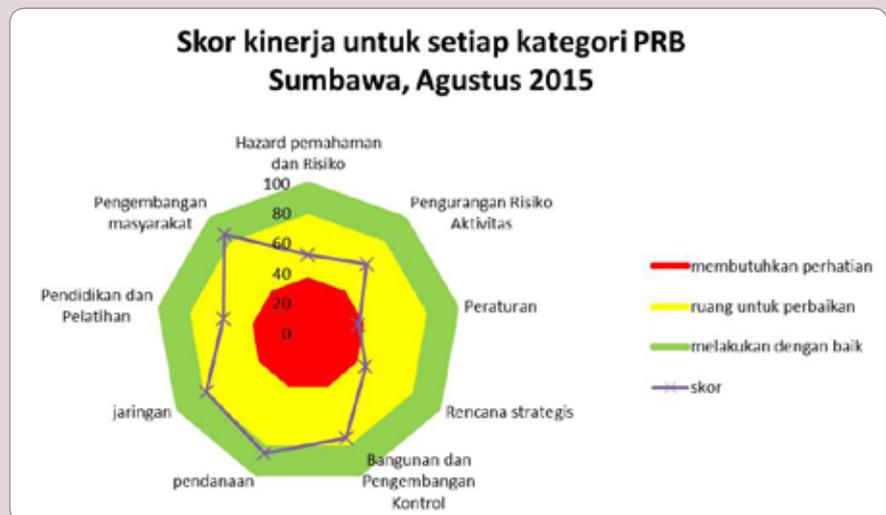
Walaupun ada struktur untuk memfasilitasi aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui peraturan dan BPBD; pelatihan dan kerjasama dalam bidang PRB di Kabupaten Sumbawa masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan hasil diskusi, teridentifikasi kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai PRB yang mengakibatkan masyarakat semakin bergantung kepada pemerintah. Adanya Forum PRB diharapkan dapat membantu koordinasi dan jaringan antara pemangku kepentingan dan mendampingi dalam perencanaan strategis yang lebih kuat.

Tanggung jawab atas PRB

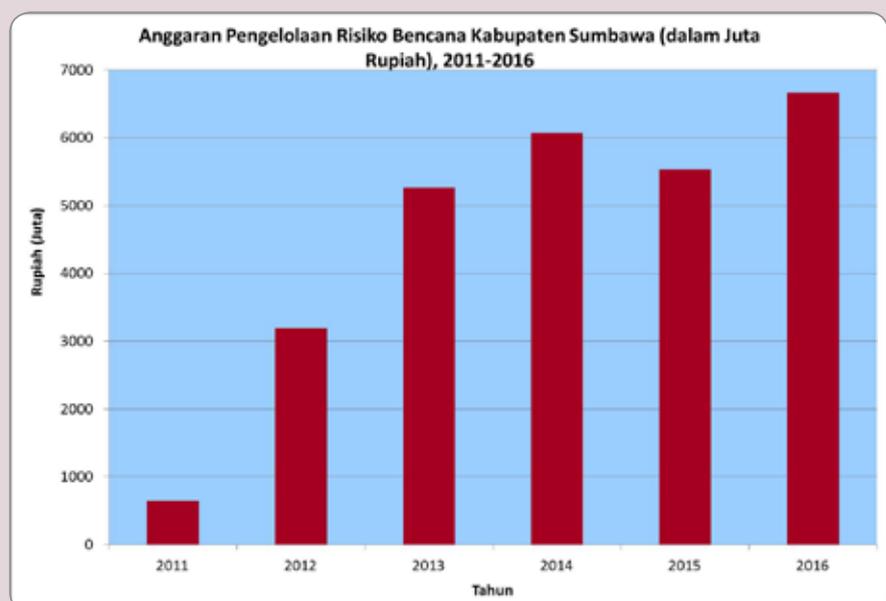
Di Kabupaten Sumbawa, instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat belum memahami dengan baik bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana.. Akibatnya aktivitas PRB menjadi tidak terkoordinasi atau terintegrasi dengan baik di lintas sektor dan dinas tersebut. Pemangku kepentingan ini umumnya memiliki pandangan bahwa penganggulangan bencana hanya merupakan tanggungjawab pemerintah dan khususnya BPBD.

Kurangnya Dukungan Regulasi

Hasil survei LG-SAT mengindikasikan sangat kurangnya regulasi yang berkaitan dengan PRB di Sumbawa. Peraturan daerah yang akan dibuat perlu mendukung peraturan di tingkat nasional yang telah ada. Selain itu regulasi yang diterapkan patut diikuti oleh implementasi penegakan dan kesadaran hukum.



Sumber: Diagram Hasil Survey Penilaian Diri Pemerintah Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Diri Pemerintah Daerah (LG-SAT) yang memberikan gambaran ringkas mengenai kelebihan dan kelemahan kondisi PRB di Kabupaten Sumbawa, Agustus 2015.



Source: BPBD Sumbawa, 2016.

TENTANG StIRRRD

PENGUATAN KETAHANAN INDONESIA MELALUI PENGURANGAN RISIKO BENCANA



Kegiatan ini kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dan GNS Science didukung oleh Program Bantuan New Zealand, untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak dari bencana alam melalui peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana oleh pemerintah lokal dan universitas lokal. Program ini meliputi sepuluh kabupaten/kota dan melibatkan universitas local untuk memahami isu tentang pengurangan risiko bencana di daerahnya, membantu kemampuannya dalam memahami dan mengelola isu tersebut, kemudian menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana dan implementasinya di lapangan.

Salah satu kunci utama disini adalah meningkatkan kerjasama antara insititusi (SKPD) di pemerintah daerah, universitas lokal dan pihak swasta dimana akan membangun pendidikan dan program penelitian dalam aspek pengelolaan bencana untuk membantu masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah terlibat secara aktif baik dalam perencanaan maupun implementasinya dan saling mendukung serta berbagi pengalaman dari seluruh daerah yang termasuk dalam program ini. Kegiatan ini didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Desa, BAPENAS dan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber:

BNPB, 2013. *Indeks Rawan Bencana Indonesia*.

BPS 2014. *Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2014*.

Gusman AR, Tanioka Y, Matsumoto H, Iwasaki S. (2009) "Analysis of the Tsunami Generated by the Great 1977 Sumba Earthquake that Occurred in Indonesia", *Bulletin of the Seismological Society of America (Seismological Society of America)* 99 (4): 2169–2179.

Catatan dari *Workshop Kunjungan Awal StIRRRD (2 Maret 2015)*.

Catatan dari *Workshop Penyusunan Rencana Aksi StIRRRD (3-4 Agustus 2015)*.

Catatan dari *Kelompok Diskusi Perempuan Terfokus StIRRRD (5 Agustus 2015)*.

INFORMASI LEBIH LANJUT:

<http://StIRRRD.org> atau

HUBUNGI:



Michele Daly

Risk and Society Department
GNS Science
Wellington, New Zealand
m.daly@gns.cri.nz



Dr. Teuku Faisal Fathani

Department of Civil and
Environmental Engineering
Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
tfathani@ugm.ac.id



Nico Fournier

Head of Volcanology
GNS Science
Wellington, New Zealand
n.fournier@gns.cri.nz



Esti Anantasari

Gadjah Mada University
Yogyakarta, Indonesia
esti.anantasari@ugm.ac.id



NEW ZEALAND
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & TRADE
Aid Programme

